

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pertumbuhan Ekonomi 2009-2013

Kondisi perekonomian Jawa Timur menunjukkan perkembangan cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRBnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2009 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp. 684,234 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.136,330 triliun pada tahun 2013. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Jawa Timur tahun 2009 meningkat dari Rp. 320,861 triliun menjadi Rp. 419,430 triliun pada tahun 2013.

Pada tahun 2009 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 5,01 persen, kemudian tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing tumbuh sebesar 6,68 persen, 7,22 persen dan 7,27 persen, namun pada tahun 2013 mengalami perlambatan menjadi 6,55 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu tersebut lebih cepat dari rata-rata nasional.

**Tabel 2.19
Pertumbuhan Ekonomi
Jawa Timur Tahun 2009 – 2013**

No	Keterangan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	684.234	778.454	884.144	1.001.721	1.136.330
2.	PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	320.861	342.281	366.984	393.666	419.430
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	6,68	7,22	7,27	6,55
4.	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	4,55	6,10	6,50	6,23	5,78

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan PDRB sektoral pada tahun 2013 hampir seluruh sektor mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sektor pertanian dari 3,49 persen menjadi 1,15 persen; sektor industri pengolahan dari 6,34 persen menjadi 5,59 persen; sektor listrik, gas dan air bersih dari 6,21 persen menjadi 4,74 persen; sektor perdagangan, hotel, dan restoran dari 10,06 persen menjadi 8,61 persen; serta sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan dari 8,01 persen menjadi 7,68 persen. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan adalah sektor pertambangan dan penggalan dari 2,10 persen menjadi 3,30 persen; sektor konstruksi dari 7,05 persen menjadi 9,08 persen; sektor pengangkutan dan

komunikasi dari 9,64 persen menjadi 10,43 persen; serta sektor jasa-jasa dari 5,07 persen menjadi 5,32 persen. Hal ini disebabkan oleh situasi perekonomian global yang masih mengalami krisis, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektoral Jawa Timur. PDRB sektoral ADHK tahun 2000 selama kurun waktu tahun 2009-2013 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009-2013 (persen)

No	Sektor	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Pertanian	3,92	2,23	2,53	3,49	1,59
2.	Pertambangan & Penggalian	6,92	9,18	6,08	2,10	3,30
3.	Industri Pengolahan	2,80	4,32	6,06	6,34	5,59
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	2,72	6,43	6,25	6,21	4,74
5.	Konstruksi	4,25	6,64	9,12	7,05	9,08
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,58	10,67	9,81	10,06	8,61
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,98	10,07	11,44	9,64	10,43
8.	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	5,30	7,27	8,18	8,01	7,68
9.	Jasa-jasa	5,76	4,34	5,08	5,07	5,32
PDRB		5,01	6,68	7,22	7,27	6,55

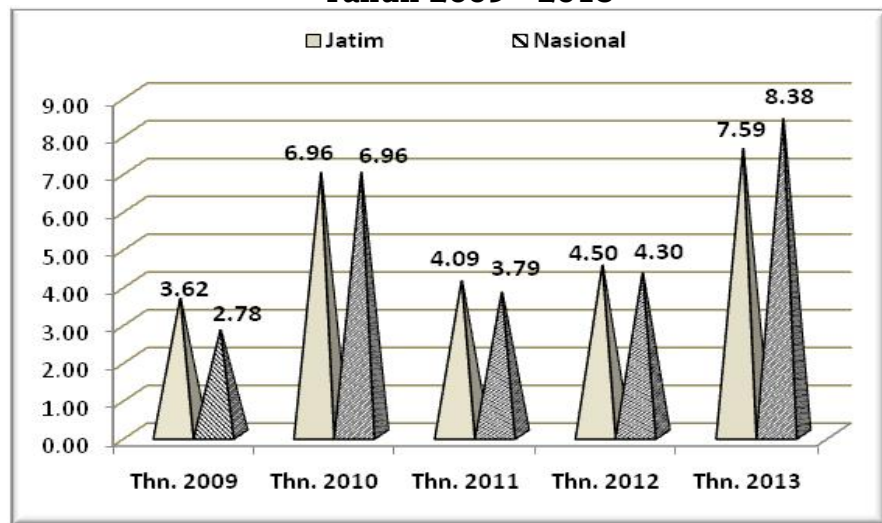
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2. Laju Inflasi Provinsi Jawa Timur

Inflasi adalah kecendrungan meningkatnya barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut menyebabkan kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain. Selain itu, kenaikan harga yang terjadi hanya sekali saja, bersifat temporer atau musiman, walaupun dalam persentase yang besar juga tidak dapat dikatakan sebagai inflasi.

Laju inflasi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2009-2013 cenderung berfluktuasi dari kisaran 3,62 persen di tahun 2009 hingga 7,59 persen di tahun 2013. Nilai inflasi Jawa Timur dari tahun 2009 - 2012 lebih tinggi dibanding dengan inflasi nasional, namun pada tahun 2013 inflasi Jawa Timur di bawah inflasi Nasional.

Gambar 2.15
Laju Inflasi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2009 - 2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tingginya inflasi Jawa Timur pada tahun 2013 disebabkan oleh kebijakan pemerintah (*Administered Price*) yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (sejak tanggal 22 Juni 2013) atau menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 40 persen. Hal ini menimbulkan dampak secara langsung pada sektor transportasi, yang selanjutnya menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan sektor lainnya.

3. PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Timur

PDRB per kapita ADHB berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.

Tabel 2.21
PDRB Per Kapita Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2009-2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	686.848	778.566	884.144	1.001.72	1.136,33
2. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan jiwa)	37.286	37.476	37.688	38.053	38.363*)
3. PDRB Per Kapita (Ribuan Rupiah)	18.421	20.775	23.760	27.194	29.620

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Ket :*) Proyeksi Penduduk 2010-2035,BPS

Pada tahun 2009 PDRB perkapita Jawa Timur mencapai Rp. 18,421 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 20,775 juta pada tahun 2010. Selanjutnya, pada tahun 2011 PDRB per kapita Jawa

Timur meningkat menjadi Rp. 23,760 juta dan pada tahun 2012 mencapai Rp. 27,194 juta kemudian pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi Rp. 29.620 juta. Hal ini merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian Jawa Timur.

Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan oleh pertumbuhan PDRB ADHB jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur semakin meningkat.

4. Indeks Gini

Metode paling sederhana dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah dapat menggunakan indeks gini. Semakin besar indeks gini, semakin tidak merata distribusi pendapatannya. Indeks gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Tabel 2.22
Nilai indeks Gini menurut Status Wilayah di Jawa Timur
Tahun 2009-2013

Tahun	Status Wilayah	Indeks Gini Jawa Timur	Indeks Gini Nasional
2009	Kota	0.34	0,37
	Desa	0.26	
	Kota+Desa	0.33	
2010	Kota	0.36	0,38
	Desa	0.26	
	Kota+Desa	0.34	
2011	Kota	0.38	0,41
	Desa	0.30	
	Kota+Desa	0.37	
2012*)	Kota	0.37	0,41
	Desa	0.30	
	Kota+Desa	0.36	
2013**)	Kota	0.39	0,41
	Desa	0.29	
	Kota+Desa	0.36	

Sumber : BPS Prov. Jawa Timur
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

G < 0,3 = Ketimpangan Rendah
0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang
G > 0,5 = Ketimpangan Tinggi

Selama kurun waktu tahun 2009-2011 nilai indeks gini di Jawa Timur menunjukkan kecendrungan kearah peningkatan, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0.01 dibandingkan tahun 2011. Sedangkan tahun 2012-2013 tidak mengalami perubahan yaitu 0,36. Kondisi tersebut, masih lebih baik bila dibandingkan nilai indeks gini Nasional dan termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (antara 0,3 – 0,5).

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen ke bawah, 40 persen menengah dan 20 persen ke atas. Jika yang distribusi pengeluaran penduduk berkategori 40 persen ke bawah adalah kurang dari 17 persen, maka wilayah itu dikatakan mempunyai ketimpangan pemerataan pendapatan yang tinggi, artinya kue ekonomi dalam wilayah itu tidak banyak dinikmati oleh masyarakat berpendapatan 40 persen ke bawah.

Tabel 2.23
Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk
Jawa Timur dan Nasional Tahun 2009-2013

Tahun	Jawa Timur		
	40 % bawah	40 % menengah	20 % atas
2009	19,86	37,59	42,55
2010	20,81	38,52	40,67
2011	21,09	38,57	40,34
2012	20,15	34,38	45,47
2013	19,82	34,55	45,63

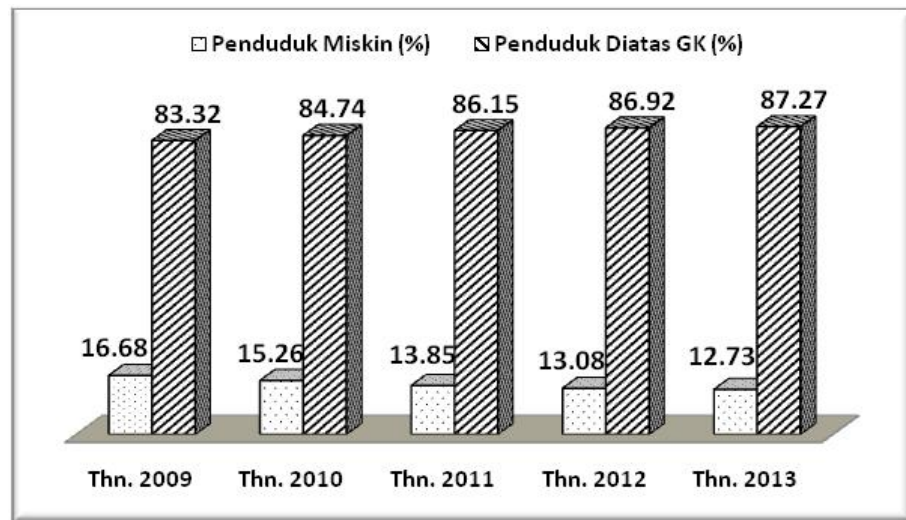
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari pengukuran pemerataan pendapatan berdasarkan versi Bank Dunia, menunjukkan bahwa kelompok yang mempunyai pendapatan berkategori pendapatan 20 persen keatas pada tahun 2009 sebesar 42,55 persen, meningkat menjadi 45,63 persen pada tahun 2013. Untuk kelompok pendapatan 40 persen menengah pada tahun 2009 sebesar 37,59 persen dan menurun pada tahun 2013 menjadi 34,55 persen. Selanjutnya 40 persen terbawah di Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 19,86 persen, kemudian menurun menjadi 19,82 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ketimpangan pendapatan 40 persen terbawah yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2013 termasuk dalam kategori rendah.

6. Presentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan, sedangkan garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk hidup layak.

Gambar 2.16
Prosentase Penduduk Miskin dan Penduduk diatas GK
Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama kurun waktu tahun 2009-2013 presentase penduduk diatas garis kemiskinan di Jawa Timur secara berturut-turut mengalami kenaikan dari 83,32 persen pada tahun 2009 menjadi 87,27 persen pada tahun 2013. Sedangkan penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 16,68 persen menjadi 12,73 persen pada tahun 2013.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

1. Angka Melek Huruf Umur 15 Tahun Keatas

Angka melek huruf merupakan salah satu bagian dari indeks pembangunan manusia, yakni pada komponen indeks pendidikan bersama dengan angka rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan baca tulis penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 - 2013

NO	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	24.492.836	24.984.639	25.077.871	25.773.409	25,230,826
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	27.896.169	28.282.363	28.244.026	28.963.661	28,316,044
3	Angka melek huruf (Persen)	87,80	88,34	88,79	89,00	89.10
4	Angka buta Huruf (Persen)	12,20	11,66	11,21	11,00	10.90

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

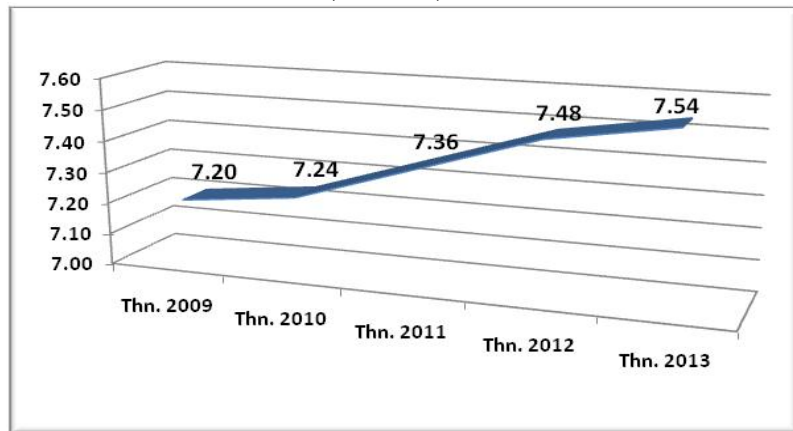
Perlu diketahui bahwa sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun ke atas ini menjadi sasaran global dan nasional. Selama kurun waktu 2009-2013, angka melek huruf di Jawa Timur mengalami peningkatan dari 87,80 persen pada tahun 2009 menjadi 88,34 persen pada tahun 2010, kemudian pada periode tahun 2011-2013 secara berturut-turut juga mengalami peningkatan, yaitu 88,79 (2011); 89,00 (2012); dan 89,10 (2013).

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Komponen lainnya dari indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah atau *Mean Years Schooling (MYS)*. Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Angka rata-rata lama sekolah di Jawa Timur dalam kurun waktu 2009-2013 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2009 sebesar 7,2 tahun, meningkat menjadi 7,24 tahun pada tahun 2010, selanjutnya meningkat kembali secara berturut-turut pada periode 2011-2013 yakni masing-masing sebesar 7,36 (2011); 7,48 (2012); dan 7,54 (2013).

Gambar 2.17
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Di Jawa Timur 2009-2013



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

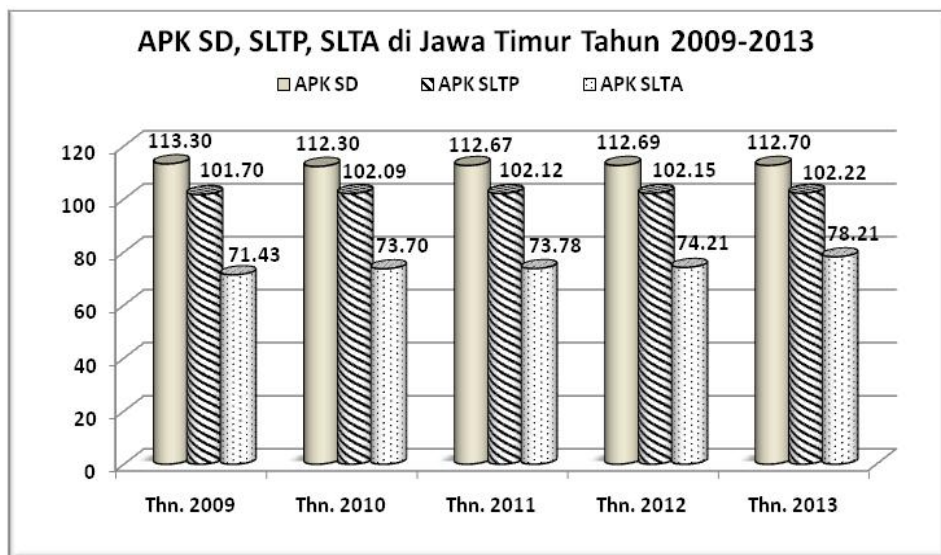
Pendidikan diniyah, dan pondok pesantren salafiyah yang jumlahnya cukup besar di Jawa Timur maupun daerah lain di Indonesia, memiliki kontribusi sangat besar bagi pendidikan nasional, dan juga turut serta dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan diniyah dan pondok pesantren salafiyah, yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat, ditujukan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Proses penyeteraan

pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan umum melalui pondok pesantren salafiyah (pendidikan dasar), dan pondok pesantren mu'adalah, serta pendidikan diniyah formal, masih mengalami permasalahan seperti pada pendidikan umum, yakni keterbatasan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan guru/ustadz. Selain itu, Lulusan pondok pesantren secara internasional tidak diakui sebagai melek huruf, hal ini menjadi salah satu kendala rendahnya angka melek huruf di Jawa Timur, sehingga membutuhkan perhatian secara serius.

3. Angka Partisipasi Kasar

Indikator pendidikan selanjutnya yang juga mendukung tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Gambar 2.18



Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Besaran APK SD di Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 113,30, kemudian pada tahun 2013 menjadi 112,70. Sementara itu, jumlah APK SLTP terus menunjukkan peningkatan. APK yang pada tahun 2009 berkisar pada angka 101,70 meningkat menjadi 102,22 pada tahun 2013, sedangkan untuk APK SLTA pada tahun 2009 sebesar 71,43 menjadi 78,21 pada tahun 2013.

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	APK SD			APK SLTP			APK SLTA		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Kabupaten									
01. Pacitan	108,24	108,25	108,43	95,75	96,32	96,49	63,53	63,62	68,06
02. Ponorogo	112,59	112,60	112,71	109,75	109,76	109,67	76,06	76,19	79,61
03. Trenggalek	120,47	120,48	120,34	103,42	103,43	103,43	69,86	69,89	74,13
04. Tulungagung	107,68	107,69	107,96	105,40	105,41	105,41	69,19	69,21	71,32
05. Blitar	104,94	104,96	105,05	99,96	99,97	99,98	62,32	62,40	66,60
06. Kediri	105,06	105,30	105,47	103,81	103,82	103,82	59,50	59,64	61,63
07. Malang	108,23	109,67	109,79	94,27	94,64	96,19	61,58	61,62	64,25
08. Lumajang	108,80	108,81	108,91	98,34	98,70	98,80	56,30	56,41	63,51
09. Jember	107,92	107,93	107,95	98,04	98,05	98,10	62,29	62,40	65,29
10. Banyuwangi	107,79	109,72	109,90	99,56	99,57	99,73	66,86	67,06	79,77
11. Bondowoso	114,21	114,21	114,24	97,97	97,99	98,01	76,79	76,81	77,97
12. Situbondo	115,29	115,29	114,70	99,11	99,12	99,12	62,76	62,79	66,72
13. Probolinggo	129,76	129,76	128,82	93,96	93,97	94,03	58,81	58,84	59,83
14. Pasuruan	111,39	112,21	112,29	97,48	98,20	98,27	80,30	80,39	84,76
15. Sidoarjo	104,63	104,64	105,04	99,38	99,39	99,40	83,91	83,97	86,77
16. Mojokerto	115,24	115,25	115,05	113,05	113,06	112,66	71,32	72,89	75,41
17. Jombang	105,57	105,59	105,78	107,85	107,86	105,04	89,38	89,53	92,50
18. Nganjuk	114,12	115,43	115,54	109,13	109,14	108,95	71,36	71,39	73,92
19. Madiun	111,65	111,66	111,79	98,08	98,39	98,43	65,66	65,86	67,57
20. Magetan	105,47	105,68	105,90	110,96	110,97	110,35	86,98	87,13	88,72
21. Ngawi	118,08	118,10	118,20	95,62	96,05	96,46	81,21	81,40	84,17
22. Bojonegoro	118,22	118,23	117,97	107,62	107,63	107,35	83,70	83,74	84,67
23. Tuban	108,85	108,86	109,02	104,65	104,66	102,52	61,36	61,44	66,44
24. Lamongan	112,30	112,37	112,66	103,05	103,06	103,64	83,72	84,53	87,45
25. Gresik	105,56	105,60	106,01	96,86	97,03	97,27	73,68	75,00	81,22
26. Bangkalan	128,71	128,72	128,28	95,46	95,50	95,57	50,33	51,14	58,34
27. Sampang	107,38	107,38	107,34	94,05	94,06	94,11	44,61	44,81	48,38
28. Pamekasan	124,02	124,03	122,99	98,81	98,82	98,85	61,76	62,07	66,87
29. Sumenep	127,14	127,14	126,18	94,09	94,10	94,17	69,87	70,09	71,62
Kota									
30. Kediri	148,85	148,86	141,17	137,19	137,20	137,20	109,92	109,95	115,20
31. Blitar	159,65	159,66	141,66	137,11	137,13	137,13	116,42	116,43	117,52
32. Malang	109,51	109,59	110,41	117,54	117,55	117,55	98,26	101,19	105,78
33. Probolinggo	112,73	112,74	113,01	116,41	116,42	116,42	96,13	97,72	103,83
34. Pasuruan	114,29	114,67	115,16	125,67	125,68	125,68	101,44	101,47	103,68
35. Mojokerto	152,84	152,85	115,05	126,47	126,49	112,66	102,45	102,46	75,41
36. Madiun	142,91	142,92	134,09	121,78	121,79	121,79	101,35	101,39	106,57
37. Surabaya	109,51	109,52	109,56	110,01	110,02	110,03	93,71	100,03	104,08
38. Batu	132,89	132,90	127,44	117,30	117,32	117,32	85,70	85,77	87,07
Jawa Timur	112,67	112,69	112,70	102,12	102,15	102,22	73,78	74,21	78,21

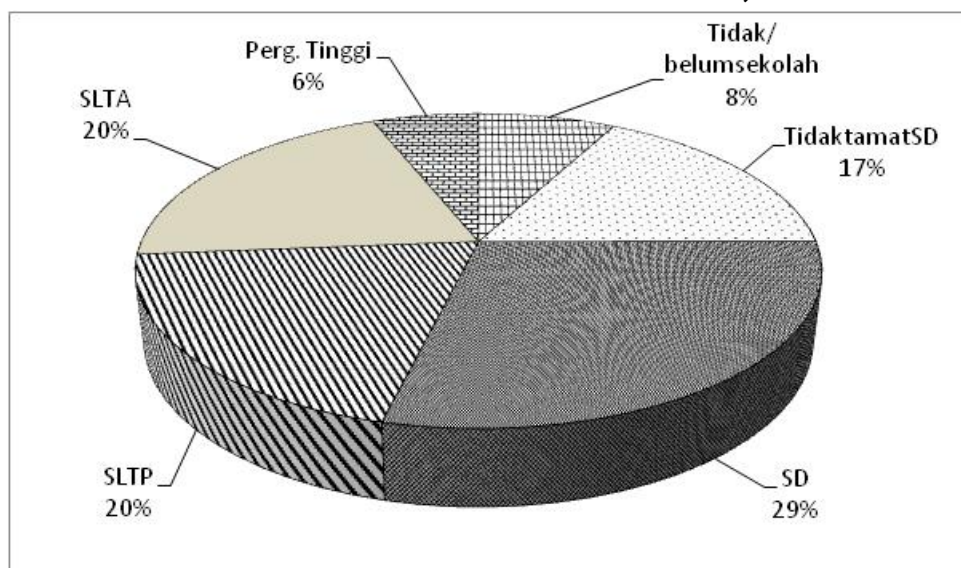
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data sebaran APK kabupaten/kota di Jawa Timur, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi, mesti dimulai dengan program lebih nyata untuk peningkatan APK pada jenjang di bawahnya terlebih dahulu. Salah satu arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 adalah peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka diperlukan upaya peningkatan capaian APK SLTP, terutama untuk kabupaten yang masih rendah capaiannya.

4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Gambar 2.19
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Jawa Timur, Tahun 2013



Sumber : BPS Jawa Timur

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur tahun 2013 yang tertinggi adalah tamatan SD yaitu sebesar 29 persen dan yang terendah adalah perguruan tinggi sebesar 6 persen. Sedangkan untuk yang tidak mempunyai ijazah atau tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD masing-masing adalah 25 persen, hal ini tentunya menjadi perhatian yang serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan tamatan SLTP pada tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2009, yaitu dari 19,37 menjadi 19,92 dan untuk tamatan SLTA juga mengalami peningkatan, yaitu dari 18,31 pada tahun 2009 menjadi 20,31 pada tahun 2013.

Tabel 2.26
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas di Jawa Timur Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Laki-laki					
Tidak/belumsekolah	5,49	6,11	5,59	4,91	4,84
TidaktamatSD	15,92	13,49	14,80	14,66	16,70
SD	27,27	31,81	30,50	29,81	28,25
SLTP	19,80	20,86	20,95	20,67	20,74
SLTA	24,76	22,01	22,40	23,51	23,18
PT	6,76	5,72	5,76	6,43	6,28
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N(000jiwa)	13.460,438	13.748,067	13.701,56	14.094.534	13,979,775
Perempuan					
Tidak/belumsekolah	14,28	15,44	13,78	13,00	10,57
TidaktamatSD	17,08	14,39	16,12	15,37	17,79
SD	26,07	30,15	28,59	28,75	29,29
SLTP	18,45	18,45	19,32	19,62	19,13
SLTA	17,97	16,54	16,86	17,76	17,51
PT	6,15	5,02	5,34	5,50	5,71
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N(000jiwa)	14478,659	14.534,031	14.542,47	14.869.127	14,336,269
Laki-laki+ Perempuan					
Tidak/belumsekolah	10,05	10,91	9,80	9,06	7,74
TidaktamatSD	16,52	13,95	15,48	15,03	17,25
SD	26,65	30,96	29,51	29,27	28,78
SLTP	19,10	19,62	20,11	20,13	19,92
SLTA	21,24	19,20	19,55	20,56	20,31
PT	6,44	5,36	5,55	5,95	6,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
N(000jiwa)	27.939.097	28.282.098	28.244.026	28.963.661	28,316,044

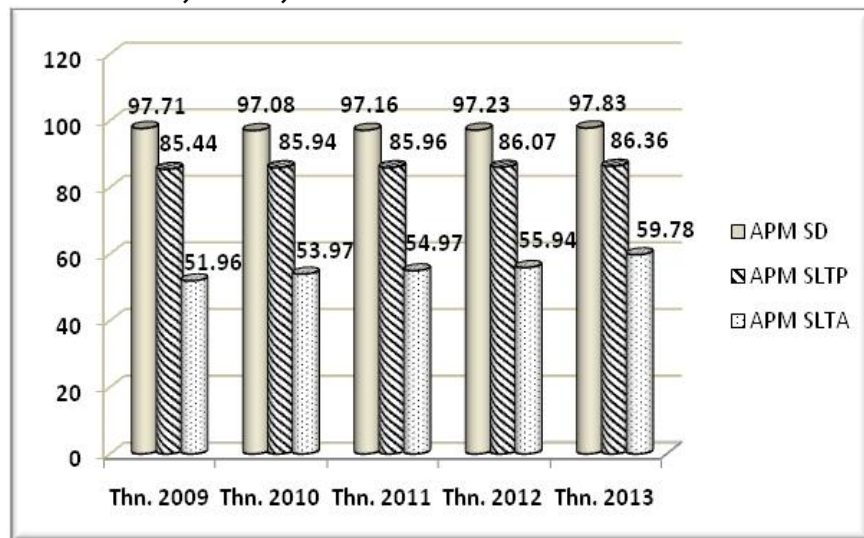
Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

5. Angka Partisipasi Murni

Indikator pendidikan lainnya yang mempengaruhi tingkat pencapaian indeks pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang

berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator APM, maka semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Gambar 2.20
APM SD, SLTP, dan SLTA Jawa Timur 2009-2013



Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2009-2013, terjadi peningkatan APM di Jawa Timur untuk semua jenjang pendidikan baik SD, SLTP, maupun SLTA. Perkembangan jenjang pendidikan SD, dimana angka APM mengalami penurunan pada periode 2009-2010, yaitu masing-masing 97,71 persen dan 97,08 persen. Selanjutnya terus meningkat pada tahun 2011 sebesar 97,16 persen hingga tahun 2013 sebesar 97,83 persen. Sementara APM SLTP Jawa Timur 2009-2013 terus mengalami peningkatan mulai 85,44 persen pada tahun 2009 menjadi 86,36 persen pada tahun 2013. Demikian halnya untuk jenjang pendidikan SLTA, capaian APM Jawa Timur tahun 2009 yaitu 51,96 persen meningkat menjadi 59,78 persen pada tahun 2013.

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PAKET A, SMP/MTs/PAKET B dan
SMA/SMK/PAKET C Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	APM SD/Mi Paket A			APM SMP/MTs/ Paket B			APM SMA/SMK/Paket C		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Kabupaten									
01. Pacitan	99,46	99,47	99,49	88,87	88,88	88,91	56,72	56,79	56,92
02. Ponorogo	99,17	99,18	99,20	98,90	98,90	98,93	60,16	60,20	60,64
03. Trenggalek	97,02	97,03	97,50	85,55	85,56	85,61	54,18	54,28	56,27
04. Tulungagung	98,32	98,33	98,52	90,20	90,21	90,29	53,62	53,69	53,81
05. Blitar	94,58	94,78	94,94	83,52	83,53	83,57	44,84	45,40	50,51
06. Kediri	94,84	94,93	95,15	84,14	84,15	84,25	42,88	43,28	48,36
07. Malang	94,59	94,89	95,12	75,25	75,26	75,37	44,49	44,64	49,42
08. Lumajang	99,48	99,49	99,67	98,17	98,17	98,18	53,63	53,84	55,36
09. Jember	95,87	95,88	96,05	78,44	78,27	78,33	47,38	47,69	48,66
10. Banyuwangi	96,05	96,25	96,79	83,71	83,72	83,80	49,08	49,25	53,08
11. Bondowoso	99,02	99,03	99,04	87,76	86,60	86,63	57,64	57,66	57,72
12. Situbondo	92,98	93,00	93,40	98,65	90,84	90,85	48,08	48,44	50,96
13. Probolinggo	96,87	96,88	97,04	73,21	72,50	72,54	38,11	38,30	40,00
14. Pasuruan	94,35	94,90	95,03	91,80	91,81	91,85	55,56	55,66	61,86
15. Sidoarjo	94,07	94,26	94,59	80,86	80,87	80,90	62,54	62,57	63,30
16. Mojokerto	99,45	99,46	99,47	94,69	94,70	94,74	56,20	56,23	60,01
17. Jombang	94,25	94,35	95,26	89,36	89,37	89,42	66,24	66,25	69,60
18. Nganjuk	98,57	98,58	98,80	88,92	88,93	88,97	53,38	53,41	58,28
19. Madiun	79,12	87,72		79,12	79,13		47,35	47,39	
20. Magetan	94,38	95,23	95,28	91,37	91,38	91,43	62,05	62,11	62,28
21. Ngawi	98,67	98,96	99,01	90,77	90,78	90,83	64,04	64,09	64,18
22. Bojonegoro	99,02	99,04	99,37	93,85	93,86	93,88	69,18	69,21	74,55
23. Tuban	97,57	97,59	97,77	85,93	85,94	85,99	44,60	44,83	49,50
24. Lamongan	98,46	98,92	99,35	82,32	82,33	82,83	59,49	59,50	62,59
25. Gresik	92,56	93,53	93,95	86,13	86,14	86,18	57,26	57,30	63,87
26. Bangkalan	97,21	97,22		85,25	83,68		42,76	43,29	
27. Sampang	93,15	93,16	93,33	73,88	73,72	73,75	21,66	21,99	31,10
28. Pamekasan	97,97	97,98	98,01	83,98	82,02	82,06	57,59	58,74	58,87
29. Sumenep	93,42	93,44	93,84	72,48	72,32	72,39	50,88	50,91	51,03
Kota									
30. Kediri	116,15	116,16	112,55	115,43	115,43	115,44	66,70	77,20	89,96
31. Blitar	146,06	146,06	128,07	114,17	114,17	114,19	88,57	88,63	94,25
32. Malang	108,30	108,31	107,92	94,38	94,39	94,51	69,31	74,70	75,74
33. Probolinggo	103,11	103,12	102,71	95,04	95,05	95,09	70,49	70,52	75,04
34. Pasuruan	106,99	107,00	107,77	101,18	101,18	101,20	93,57	93,58	93,58
35. Mojokerto	121,30	121,31	113,63	103,32	103,32	103,34	79,24	79,26	84,90
36. Madiun	130,06	130,07	126,21	103,37	103,37	103,39	74,24	75,71	77,31
37. Surabaya	98,79	98,80	98,90	94,23	94,24	94,36	67,65	73,28	87,11
38. Batu	103,92	103,93	103,08	94,98	94,99	95,04	64,52	64,65	66,41
Jawa Timur	97,16	97,23	97,83	85,96	86,07	86,36	54,97	55,94	59,78

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2.1.2.2.2 Kesehatan

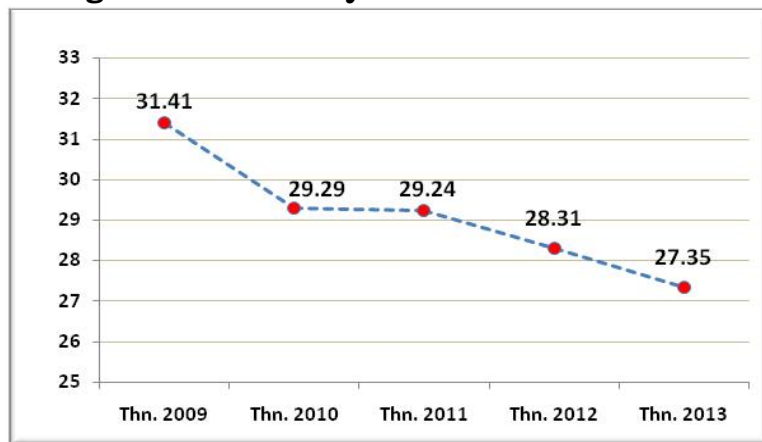
1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian *neo-natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *neo-natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka

kematian *neo-natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Angka kematian bayi perlu terus ditekan, karena merupakan indikator penting di bidang kesehatan, hal ini menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka kematian bayi di Jawa Timur terus menurun, yaitu dari 31,41 pada tahun 2009 menjadi 27,35 per 1.000 kelahiran tahun 2013.

Gambar 2.21
Angka Kematian Bayi Jawa Timur 2009-2013



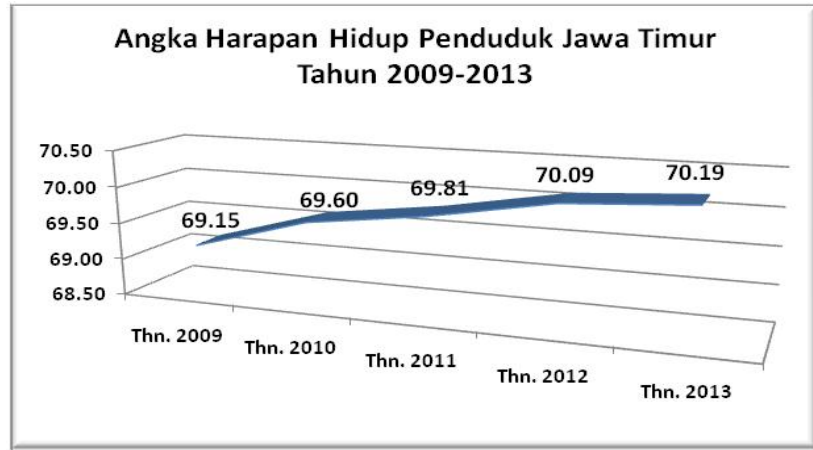
Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran terus menurun. Angka harapan hidup makin meningkat, dan persentase balita dengan kasus gizi buruk terus menyusut.

2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan kesehatan pada khususnya. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu daerah, maka semakin tinggi keberhasilan program kesehatan dan program sosial lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Gambar 2.22



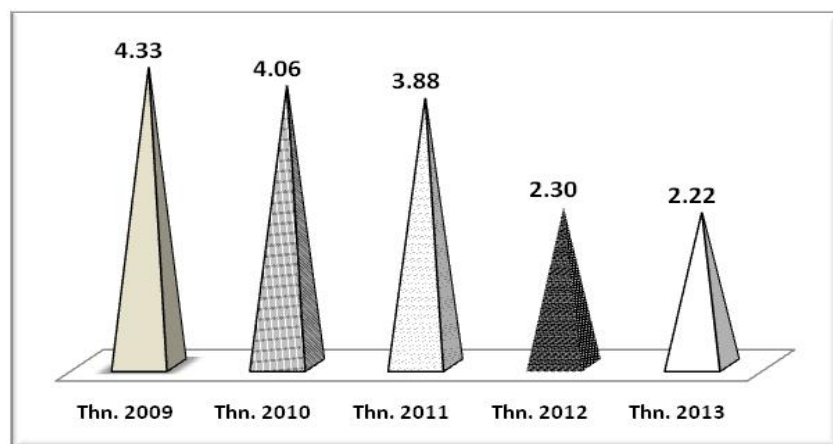
Sumber : BPS Jawa Timur

Perkembangan angka harapan hidup di Jawa Timur selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 69, 15 tahun pada 2009 menjadi 69,60 tahun pada 2010. Kemudian kurun waktu 2011-2013 terus meningkat masing- masing 69,81 tahun (2011); 70,09 tahun (2012); 70,19 tahun (2013). Peningkatan tersebut merupakan dampak membaiknya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat status gizi masyarakat. Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Persentase balita gizi buruk adalah proporsi balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita.

Gambar 2.23
Persentase Balita Gizi Buruk
Jawa Timur Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Jawa Timur

Perkembangan persentase gizi buruk di Jawa Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan, yakni berturut-turut 4,33 persen (2009); 4,06 persen (2010); 3,88 persen

(3,88); 2,30 persen (2012), dan 2,22 persen (2013). Dengan semakin tinggi jumlah balita dengan status gizi buruk di suatu daerah, maka semakin buruk kondisi kesehatan penduduk di daerah tersebut. Hal ini merupakan indikasi rendahnya kemampuan suatu daerah tersebut menyediakan layanan dan akses kesehatan bagi penduduk.

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Rasio Penduduk Yang Bekerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2013 sebesar 95,67 persen yang berarti bahwa dari 100 orang jumlah angkatan kerja, terdapat 96 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga

2.1.2.3.1 Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Seni merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa sehingga merupakan sesuatu yang elok atau indah. Jumlah grup kesenian adalah jumlah kelompok tradisional kesenian yang berada di suatu wilayah. Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah diperlukan adanya upaya untuk menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Kelompok seni dan budaya yang berperan sebagai penyelenggara kesenian memberikan dukungan dalam pelestarian seni dan budaya. Perkembangan jumlah kelompok kesenian pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 2.794 grup menjadi 2.892 grup. Dengan semakin banyaknya grup kesenian menunjukkan semakin tinggi perhatian pemerintah dalam pengembangan kesenian daerah.

2. Jumlah Gedung Budaya dan Seni

Gedung kesenian adalah suatu tempat yang diperuntukan secara khusus untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian, seperti seni tari, vocal, teater, dll. Keberadaan gedung kesenian diharapkan dapat menjadi media segenap lapisan masyarakat dalam mengaktualisasi kebudayaan daerah dan sekaligus menjadi sarana dalam pengenalan maupun pelestarian seni dan budaya daerah. Perkembangan jumlah gedung kesenian pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012, yaitu dari 5 gedung kesenian menjadi 55 gedung kesenian. Dengan semakin banyaknya gedung kesenian menunjukkan semakin mampu suatu daerah menyediakan sarana untuk mengembangkan kesenian tradisional daerah.

2.1.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

1. Jumlah Klub Olah Raga

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan social masyarakat sedangkan jumlah klub olahraga adalah perkumpulan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga bagi para anggotanya guna peningkatan prestasi maupun dengan tujuan lain yaitu menjaga kesehatan. Perkembangan jumlah klub olahraga pada tahun 2013 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebanyak 3.074 klub olahraga menjadi 12.291 klub olahraga. Semakin berkembangnya klub-klub olahraga memberikan kontribusi peningkatan prestasi olah raga regional dan nasional baik yang bersifat amatir maupun professional.

2. Jumlah Gedung Olah Raga

Gedung olahraga adalah prasarana tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan penyelenggaraan keolahragaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana latihan dan pertandingan olahraga maka perlu adanya sarana gedung yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam jenis olahraga. Perkembangan jumlah gedung olahraga pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebanyak 99 gedung olahraga.

Dengan ketersediaan jumlah lapangan olahraga yang ada tersebut, maka yang perlu untuk ditingkatkan adalah kualitas lapangan olahraga sesuai standar nasional serta pemanfaatan dan pemeliharanya. Adanya lapangan olahraga yang memenuhi standar, maka diharapkan mampu mendukung peningkatan potensi dan prestasi olahraga.